

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandung, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Wiratno, M.Env, Mgt
NIP. 19630702 198903 1 002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - B.5.3. Belanja Modal Lainnya
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
 - C.1.2. Piutang Bukan Pajak
 - C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
 - C.1.4. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Tak Berwujud
 - C.4.2. Aset Lain-lain
 - C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.6. Ekuitas
 - C.6.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas

- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Wiratno, M.Env, Mgt
NIP. 19630702 198903 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp297,444,157.00 atau mencapai 73.44% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp405,000,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp90,257,462,556.00 atau mencapai 96.34% dari alokasi anggaran sebesar Rp93,688,324,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp78,277,777,707.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp6,171,798,850.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp72,086,663,008.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp19,315,849.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp78,277,777,707.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp344,258,030.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp85,621,879,202.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-85,277,621,172.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-244,203,304.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-85,521,824,476.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp74,117,345,844.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-85,521,824,476.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-2,121,563,710.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp91,803,820,049.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp78,277,777,707.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	405,000,000.00	297,444,157.00	73.44	449,490,436.00
Jumlah Pendapatan		405,000,000.00	297,444,157.00	73.44	449,490,436.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	8,182,745,000.00	7,725,913,796.00	94.42	7,969,922,769.00
Belanja Barang	B.4.	83,590,379,000.00	80,682,108,210.00	96.52	49,766,731,221.00
Belanja Modal	B.5.	1,915,200,000.00	1,849,440,550.00	96.57	2,461,315,785.00
Jumlah Belanja		93,688,324,000.00	90,257,462,556.00	96.34	60,197,969,775.00

II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1.	3,902,500,000.00	0.00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	120,000,000.00	60,000,000.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	-60,000,000.00	-6,000,000.00
Persediaan	C.1.4.	2,209,298,850.00	1,615,397,000.00
Jumlah Aset Lancar		6,171,798,850.00	1,669,397,000.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	47,379,008,000.00	47,379,008,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	19,213,426,646.00	17,152,195,221.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	17,721,844,484.00	18,412,816,709.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2,442,828,060.00	2,436,146,060.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	403,126,882.00	403,126,882.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-15,073,571,064.00	-13,357,602,102.00
Jumlah Aset Tetap		72,086,663,008.00	72,425,690,770.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	6,115,000.00	6,115,000.00
Aset Lain-lain	C.4.2.	360,365,400.00	445,565,400.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-347,164,551.00	-429,422,326.00
Jumlah Aset Lainnya		19,315,849.00	22,258,074.00
Jumlah Aset		78,277,777,707.00	74,117,345,844.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0.00	0.00
Jumlah Kewajiban		0.00	0.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	78,277,777,707.00	74,117,345,844.00
Jumlah Ekuitas		78,277,777,707.00	74,117,345,844.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		78,277,777,707.00	74,117,345,844.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	344,258,030.00	364,717,700.00
JUMLAH PENDAPATAN		344,258,030.00	364,717,700.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	7,725,913,796.00	7,969,922,769.00
Beban Persediaan	D.3.	3,845,244,400.00	8,117,466,355.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	9,848,596,944.00	8,230,155,506.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	611,315,140.00	685,948,000.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	4,661,723,445.00	4,529,562,655.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	49,879,072,000.00	0.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	7,046,000,000.00	33,658,657,389.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	1,950,013,477.00	1,767,750,914.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10.	54,000,000.00	-3,795,284.00
JUMLAH BEBAN		85,621,879,202.00	64,955,668,304.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-85,277,621,172.00	-64,590,950,604.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	295,156,277.00	6,347,696,802.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	539,359,581.00	19,417,850.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-244,203,304.00	6,328,278,952.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-85,521,824,476.00	-58,262,671,652.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	74,117,345,844.00	20,380,298,884.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-85,521,824,476.00	-58,262,671,652.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-2,121,563,710.00	51,301,456,241.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	-2,191,046,000.00	51,308,868,305.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	69,482,290.00	-7,412,064.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	91,803,820,049.00	60,698,262,371.00
EKUITAS AKHIR	E.5.	78,277,777,707.00	74,117,345,844.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	405,000,000.00	405,000,000.00
Jumlah Pendapatan	405,000,000.00	405,000,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8,054,238,000.00	8,054,238,000.00
Belanja Lembur	128,507,000.00	128,507,000.00
Belanja Barang Operasional	1,437,700,000.00	1,437,700,000.00
Belanja Barang Non Operasional	4,503,579,000.00	8,195,084,000.00
Belanja Barang Persediaan	2,030,990,000.00	3,004,154,000.00
Belanja Jasa	848,550,000.00	998,700,000.00
Belanja Pemeliharaan	385,000,000.00	383,000,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,398,175,000.00	4,759,200,000.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	46,868,220,000.00	64,812,541,000.00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	9,590,000,000.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251,000,000.00	347,000,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132,000,000.00	1,568,200,000.00
Jumlah Belanja	76,627,959,000.00	93,688,324,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp297,444,157.00 atau mencapai 73.44% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp405,000,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0.00	1,800,000.00	0.00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	405,000,000.00	281,408,030.00	69.48
Pendapatan Jasa Lainnya	0.00	2,850,000.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	11,386,127.00	0.00
Jumlah	405,000,000.00	297,444,157.00	73.44

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -33.83% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1,800,000.00	16,387,700.00	- 89.02
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	281,408,030.00	419,767,700.00	- 32.96
Pendapatan Jasa Lainnya	2,850,000.00	3,250,000.00	- 12.31
Pendapatan Lain-lain	11,386,127.00	10,085,036.00	12.90
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0.00	0.00	0.00
Jumlah	297,444,157.00	449,490,436.00	- 33.83

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp90,257,462,556.00 atau 96.34% dari anggaran belanja sebesar Rp93,688,324,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	8,182,745,000.00	7,728,109,699.00	94.44
Belanja Barang	83,590,379,000.00	80,682,108,210.00	96.52
Belanja Modal	1,915,200,000.00	1,849,440,550.00	96.57
Total Belanja Kotor	93,688,324,000.00	90,259,658,459.00	96.34
Pengembalian Belanja		-2,195,903.00	0.00
Total Belanja	93,688,324,000.00	90,257,462,556.00	96.34

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 49.93% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. tambah pagu

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	7,725,913,796.00	7,969,922,769.00	-3.06
Belanja Barang	80,682,108,210.00	49,766,731,221.00	62.12
Belanja Modal	1,849,440,550.00	2,461,315,785.00	-24.86
Total Belanja	90,257,462,556.00	60,197,969,775.00	49.93

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7,725,913,796.00 dan Rp7,969,922,769.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -3.06% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya beberapa Pegawai yang memasuki masa Purnabakti

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7,599,717,699.00	7,858,848,522.00	-3.30
Belanja Lembur	128,392,000.00	118,747,000.00	8.12
Jumlah Belanja Kotor	7,728,109,699.00	7,977,595,522.00	-3.13
Pengembalian Belanja Pegawai	-2,195,903.00	-7,672,753.00	-71.38
Jumlah Belanja	7,725,913,796.00	7,969,922,769.00	-3.06

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp80,682,108,210.00 dan Rp49,766,731,221.00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 62.12% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Hampir semua kegiatan Program Bekerja telah terealisasi

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,422,482,000.00	1,320,714,550.00	7.71
Belanja Barang Non Operasional	7,744,033,582.00	5,926,452,840.00	30.67
Belanja Barang Persediaan	2,733,318,600.00	3,998,975,355.00	-31.65
Belanja Jasa	682,081,362.00	997,275,332.00	-31.61
Belanja Pemeliharaan	378,783,040.00	392,238,100.00	-3.43
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4,661,723,445.00	4,529,562,655.00	2.92
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	63,059,686,181.00	32,601,512,389.00	93.43
Jumlah Belanja Kotor	80,682,108,210.00	49,766,731,221.00	62.12
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	80,682,108,210.00	49,766,731,221.00	62.12

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,849,440,550.00 dan Rp2,461,315,785.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja

modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -24.86% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada TA. 2019 alokasi Belanja Modal senilai Rp. 1.849.440.550,- diperuntukkan untuk pembangunan di KP Cipaku dalam bentuk Renovasi Gedung Kantor Cipaku, Renovasi Kandang Indukan Ayam, Show room, Lantai Jemur

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	342,684,775.00	2,346,754,785.00	-85.40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,506,755,775.00	98,976,000.00	1,422.34
Belanja Modal Lainnya	0.00	15,585,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	1,849,440,550.00	2,461,315,785.00	-24.86
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	1,849,440,550.00	2,461,315,785.00	-24.86

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp342,684,775.00 dan Rp2,346,754,785.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar -85.40% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pada Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 85% dikarenakan pos anggaran TA. 2019 untuk Belanja Peralatan dan Mesin tidak sebesar TA. 2018 adapun pembelian Peralatan dan Mesin berupa Komputer, Laptop, dan Printer untuk menunjang Operasional KP Cipaku

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	342,684,775.00	2,346,754,785.00	-85.40
Jumlah Belanja Kotor	342,684,775.00	2,346,754,785.00	-85.40
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	342,684,775.00	2,346,754,785.00	-85.40

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,506,755,775.00 dan Rp98,976,000.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019

mengalami kenaikan sebesar 1,422.34% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Untuk Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar 1.422% hal ini dikarenakan adanya beberapa Pembangunan meliputi Rehabilitasi Lantai Jemur di BPTP Jawa Barat dan KP Cipaku, Rehab Gedung Kantor, Rehab Kandang Ayam

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,506,755,775.00	98,976,000.00	1,422.34
Jumlah Belanja Kotor	1,506,755,775.00	98,976,000.00	1,422.34
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	1,506,755,775.00	98,976,000.00	1,422.34

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3,902,500,000.00 dan Rp0.00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019
Penjelasan 1	0,00
Penjelasan 2	0,00
dst...	0,00
Jumlah	0,00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp120,000,000.00 dan Rp60,000,000.00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	120,000,000.00	60,000,000.00
Jumlah	120,000,000.00	60,000,000.00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-60,000,000.00 dan Rp-6,000,000.00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2,209,298,850.00 dan Rp1,615,397,000.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Suku Cadang	0.00	3,314,000.00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	169,853,000.00	169,853,000.00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	238,100,000.00	238,100,000.00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1,793,320,850.00	0.00
Bahan Baku	8,025,000.00	1,204,130,000.00
Jumlah	2,209,298,850.00	1,615,397,000.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp47,379,008,000.00 dan Rp47,379,008,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19,213,426,646.00 dan Rp17,152,195,221.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	17,152,195,221.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	95,700,000.00
Transfer Masuk	1,967,146,650.00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	246,984,775.00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-248,600,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	19,213,426,646.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-13,741,824,074.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	5,471,602,572.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi Penambahan Peralatan dan Mesin terbagi menjadi dua bagian yaitu yang berasal dari pembelian dan transfer masuk, adapun Peralatan dan mesin yang dari hasil pembelian senilai Rp.95.700.000,- berupa :
 - 1 Unit Mesin Pompa Air
 - 1 Set Sice
 - 1 Unit Sound System
 - 2 Unit Laptop
 - 3 Unit Komputer
 - 1 Unit Printer

Sementara Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari transfer masuk senilai Rp.1.779.146.650,- berupa :

- 13 Unit Pesawat Tak Berawak
- 13 Unit LCD Projector/Infocus
- 1 Unit Televisi
- 13 Unit Camera Conference
- 13 Unit Handphone Encryption
- 64 PC unit
- 1 Unit Notebook

2. Jelaskan mutasi pengurangan
 - 1 Unit Kendaraan Roda 4

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17,721,844,484.00 dan Rp18,412,816,709.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	18,412,816,709.00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	899,743,200.00
Pengembangan Nilai Aset	607,012,575.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-2,197,728,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	17,721,844,484.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-697,956,933.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	17,023,887,551.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Transaksi penambahan berupa penyelesaian pembangunan dengan KDP senilai berupa Rp. 899.743.200,- berupa :
 - Bangunan Gedung Kantor Permanen
 - Bangunan Lantai Jemur Permanen

Dan Pengembangan Nilai Aset senilai Rp 607.012.575,- berupa :

 - Pembangunan Tempat Parkir kendaraan Roda 2
2. Jelaskan mutasi pengurangan
 - Tidak ada mutasi pengurangan nilai Gedung

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2,442,828,060.00 dan Rp2,436,146,060.00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	2,436,146,060.00
Mutasi Tambah	

Koreksi Kesalahan input IP	6,682,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	2,442,828,060.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-573,486,923.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1,869,341,137.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp403,126,882.00 dan Rp403,126,882.00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-15,073,571,064.00 dan Rp-13,357,602,102.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	19,213,426,646.00	-13,741,824,074.00	5,471,602,572.00
2.	Gedung dan Bangunan	17,721,844,484.00	-697,956,933.00	17,023,887,551.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,442,828,060.00	-573,486,923.00	1,869,341,137.00
4.	Aset Tetap Lainnya	403,126,882.00	0.00	403,126,882.00
Akumulasi Penyusutan		39,781,226,072.00	-15,073,571,064.00	24,707,655,008.00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6,115,000.00 dan Rp6,115,000.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6,115,000.00
Jumlah	6,115,000.00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp360,365,400.00 dan Rp445,565,400.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	445,565,400.00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-85,200,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	360,365,400.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-341,049,551.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	19,315,849.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Tidak ada Penambahan Aset Lain lain
2. Mutasi Pengurangan Aset Lain-lain berupa penghapusan Kendaraan Dinas Minibus Roda 4

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-347,164,551.00 dan Rp-429,422,326.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6,115,000.00	-6,115,000.00	0.00
2.	Aset Lain-lain	360,365,400.00	-341,049,551.00	19,315,849.00
Akumulasi Penyusutan		366,480,400.00	-347,164,551.00	19,315,849.00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp78,277,777,707.00 dan Rp74,117,345,844.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp344,258,030.00 dan Rp364,717,700.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Lainnya	2,850,000.00	3,250,000.00	-12.31
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2,325,000.00	7,500,000.00	-69.00
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	0.00	42,500,000.00	-100.00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	331,225,030.00	289,629,100.00	14.36
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	4,600,000.00	6,000,000.00	-23.33
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,258,000.00	15,838,600.00	-79.43
Jumlah	344,258,030.00	364,717,700.00	-5.61

Pendapatan PNBP per 31 Desember 2019 berasal dari Sewa Rumah Dinas, Sewa Lahan ATM, Hasil Produksi Pertanian, Penerimaan Belanja Pegawai, Ganti Rugi Penyelesaian Terhadap Pihak ke Tiga dan Pendapatan Jasa

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7,725,913,796.00 dan Rp7,969,922,769.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	5,213,249,920.00	5,316,650,020.00	-1.94
Beban Pembulatan Gaji PNS	81,328.00	73,187.00	11.12
Beban Tunj. Anak PNS	118,585,442.00	119,107,938.00	-0.44
Beban Tunj. Beras PNS	265,274,460.00	279,686,040.00	-5.15
Beban Tunj. Fungsional PNS	779,630,000.00	882,048,000.00	-11.61
Beban Tunj. PPh PNS	37,874,376.00	37,586,484.00	0.77
Beban Tunj. Struktural PNS	31,500,000.00	18,540,000.00	69.90
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	383,600,270.00	386,439,100.00	-0.73
Beban Tunjangan Umum PNS	141,860,000.00	148,585,000.00	-4.53
Beban Uang Lembur	128,392,000.00	118,747,000.00	8.12
Beban Uang Makan PNS	625,866,000.00	662,460,000.00	-5.52
Jumlah	7,725,913,796.00	7,969,922,769.00	-3.06

Diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3,845,244,400.00 dan Rp8,117,466,355.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	1,294,754,440.00	6,752,495,350.00	-80.83
Beban Persediaan konsumsi	2,529,634,060.00	1,216,505,355.00	107.94
Beban persediaan lainnya	20,855,900.00	148,465,650.00	-85.95
Jumlah	3,845,244,400.00	8,117,466,355.00	-52.63

Beban Persediaan Bahan Baku yang bersumber dari kegiatan Taman Teknologi Pertanian yang akan diserahkan kepada Masyarakat seperti Bangunan, Alsintan, dan Ternak

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9,848,596,944.00 dan Rp8,230,155,506.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	2,839,768,582.00	3,145,398,840.00	-9.72
Beban Barang Non Operasional Lainnya	870,015,000.00	1,628,569,000.00	-46.58
Beban Barang Operasional Lainnya	70,700,000.00	74,933,750.00	-5.65
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	270,064,000.00	170,920,000.00	58.01
Beban Honor Output Kegiatan	4,034,250,000.00	1,152,485,000.00	250.05
Beban Jasa Konsultan	20,000,000.00	0.00	0.00
Beban Jasa Lainnya	6,720,000.00	25,000,000.00	-73.12
Beban Jasa Profesi	378,700,000.00	195,300,000.00	93.91
Beban Keperluan Perkantoran	1,057,980,000.00	1,052,291,500.00	0.54
Beban Langganan Listrik	109,583,734.00	131,542,462.00	-16.69
Beban Langganan Telepon	11,327,628.00	17,385,654.00	-34.85
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	23,738,000.00	22,569,300.00	5.18
Beban Sewa	155,750,000.00	613,760,000.00	-74.62
Jumlah	9,848,596,944.00	8,230,155,506.00	19.66

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin pada Belanja Modal adalah berupa Timbangan Digital, Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan adalah nilai yang dibawah kapitalisasi

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp611,315,140.00 dan Rp685,948,000.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100,907,500.00	108,322,000.00	-6.84
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	277,875,540.00	283,916,100.00	-2.13
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	30,839,500.00	81,192,025.00	-62.02
Beban Persediaan suku cadang	201,692,600.00	212,517,875.00	-5.09
Jumlah	611,315,140.00	685,948,000.00	-10.88

Beban Pemeliharaan pada TA. 2019 adalah Peleburan Gedung Kantor, Perawatan Kendaraan Dinas, Perawatan Suku Cadang

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4,661,723,445.00 dan Rp4,529,562,655.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	4,536,773,445.00	3,595,811,034.00	26.17
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	124,950,000.00	585,110,000.00	-78.65
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0.00	348,641,621.00	-100.00
Jumlah	4,661,723,445.00	4,529,562,655.00	2.92

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk mendukung Kegiatan Pengkajian di BPTP Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp56,925,072,000.00 dan Rp33,658,657,389.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0.00	29,249,108,065.00	-100.00
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0.00	4,409,549,324.00	-100.00
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	7,046,000,000.00	0.00	0.00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	5,009,466,150.00	0.00	0.00
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	44,869,605,850.00	0.00	0.00
Jumlah	56,925,072,000.00	33,658,657,389.00	69.12

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, adapun Program Bekerja merupakan cerminan dari kegiatan yang dimaksud

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,950,013,477.00 dan Rp1,767,750,914.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	1,528,750.00	1,528,750.00	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	350,100,696.00	397,991,330.00	-12.03
Beban Penyusutan Irigasi	18,664,874.00	20,442,624.00	-8.70
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7,358,283.00	9,440,600.00	-22.06
Beban Penyusutan Jaringan	44,469,648.00	44,469,648.00	0.00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,413,475.00	1,413,475.00	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,526,477,751.00	1,292,464,487.00	18.11
Jumlah	1,950,013,477.00	1,767,750,914.00	10.31

Penyusutan Gedung dan Bangunan, Software, Irigasi, Jaringan dan peralatan dan mesin sudah tertuang dalam aplikasi SIMAK BMN

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp54,000,000.00 dan Rp-3,795,284.00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	54,000,000.00	5,408,500.00	898.43
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0.00	-9,203,784.00	-100.00
Jumlah	54,000,000.00	-3,795,284.00	- 1,522.82

Masih terdapat beban penyisihan Piutang PNB yang sampai saat ini belum terselesaikan, adapun piutang tersebut merupakan dari kelebihan bayar dari kegiatan UPBS Padi dan Kedelai tahun anggaran 2016, dan sekarang masih dalam proses penyelesaian

D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00	0.00	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-539,359,581.00	-19,417,850.00	2,677.65
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0.00	16.00	-100.00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	1,800,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	281,970,150.00	1,069,831,750.00	-73.64
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0.00	5,267,780,000.00	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	11,386,127.00	10,085,036.00	12.90
Jumlah	-244,203,304.00	6,328,278,952.00	-103.86

Pengembalian/Denda atas keterlambatan pekerjaan dan Pengembalian Belanja Pegawai telah dilakukan sesuai dengan aturan perbendaharaan

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp74,117,345,844.00 dan Rp20,380,298,884.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-85,521,824,476.00 dan Rp-58,262,671,652.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-2,121,563,710.00 dan Rp51,301,456,241.00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-2,191,046,000.00 dan Rp51,308,868,305.00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Gedung dan Bangunan	-2,197,728,000.00
Jalan dan Jembatan	28,015,000.00
Irigasi	-21,333,000.00
Jumlah	-2,191,046,000.00

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp69,482,290.00 dan Rp-7,412,064.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	67,666,190.00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	1,777,750.00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	38,350.00
Jumlah	69,482,290.00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp91,803,820,049.00 dan Rp60,698,262,371.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	90,257,462,556.00
Diterima dari Entitas Lain	-297,444,157.00
Transfer Keluar	-36,365,000.00
Transfer Masuk	1,880,166,650.00
Jumlah	91,803,820,049.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-297,444,157.00 sedangkan DKEL sebesar Rp90,257,462,556.00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1,880,166,650.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018010199451949000KP	86,980,000.00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018010199451949000KP	-86,980,000.00
3.	Peralatan dan Mesin	018030199238251000KP	1,411,734,400.00
4.	Peralatan dan Mesin	018100200417402000KD	468,432,250.00
Jumlah			1,880,166,650.00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-36,365,000.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018090199411971000KP	-248,600,000.00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018090199411971000KP	248,600,000.00
3.	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	018090200237221000KD	-10,675,000.00
4.	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	018090200648669000KD	-25,690,000.00
Jumlah			-36,365,000.00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp78,277,777,707.00 dan Rp74,117,345,844.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada BPTP Jawa Barat TA 2018, tidak ada penggantian Pejabat Pengelola Keuangan pada Penanda tangan SPM
- Tindak lanjut hasil temuan audit Inspektorat Nomor R.48/PW.140/G.4/01/2018 perihal Pencatatan MAK 526 pada Persediaan sudah dilakukan dan tertuang dalam Berita Acara Stock Opname Persediaan dan sudah di jelaskan

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada BPTP Jawa Barat TA 2019, tidak ada penggantian Pejabat Pengelola Keuangan pada Penanda tangan SPM dan Pejabat Pembuat Komitmen